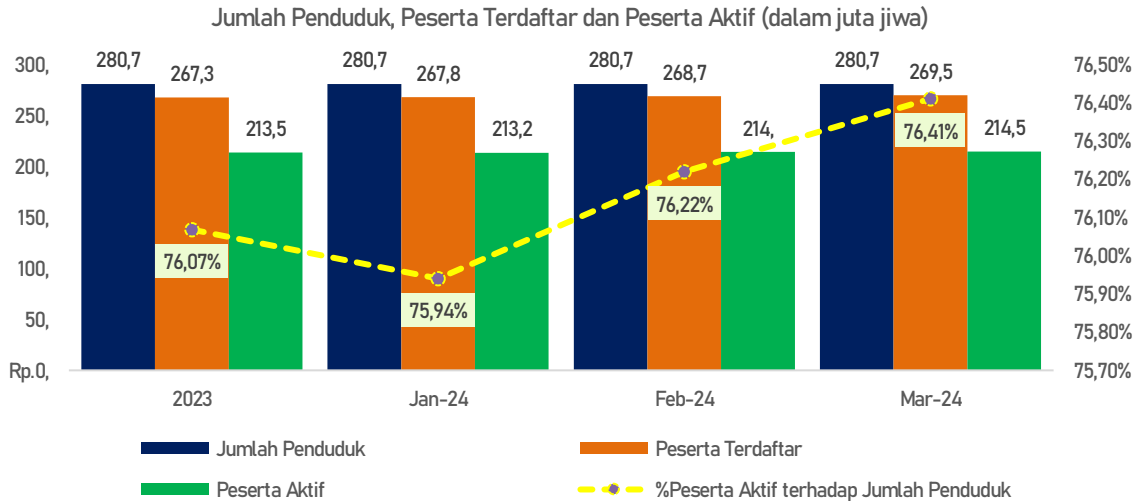


LAPORAN KINERJA PROGRAM JKN TRIWULAN I TAHUN 2024

I. Kepesertaan

Cakupan kepesertaan JKN Per 31 Maret 2024 telah mencapai 269,5 juta jiwa atau 96% dari total penduduk Indonesia Semester I Tahun 2024. Capaian tersebut, masih dalam upaya memenuhi target cakupan kepesertaan tahun 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024, ditargetkan 98% dari jumlah penduduk. Cakupan peserta tumbuh 2,18 juta (0,82%) dibanding 31 Desember 2023.



Sumber : Dukcapil Kemendagri dan BPJS Kesehatan, diolah

Meskipun capaian cakupan peserta telah mencapai 269,5 juta jiwa atau 96% dari total penduduk, namun capaian **kepesertaan aktif** baru mencapai 214,5 juta jiwa atau 76,41% dari jumlah penduduk, atau 79,59% dari keseluruhan peserta. Peserta aktif tumbuh tumbuh 0,45% atau 959,4 ribu jiwa dibanding 31 Desember 2023, rincian penambahan peserta aktif adalah sebagai berikut :

Jumlah Peserta Aktif s.d Triwulan I Tahun 2024

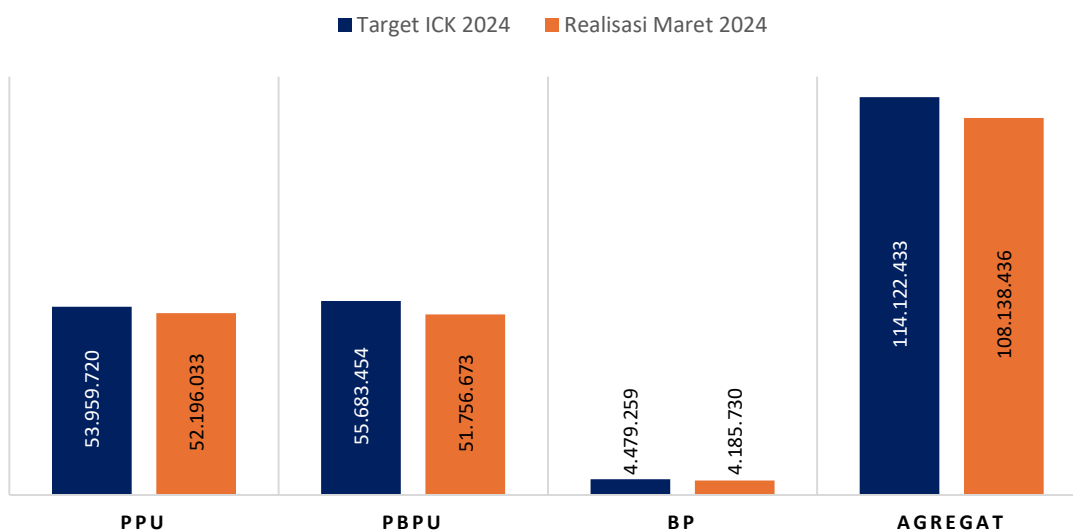
No	Segmen Peserta	Jumlah Peserta Aktif				Penambahan/Pengurangan	
		Des-22	Mar-23	Des-23	Mar-24	Mar-23	Mar-24
A.	Penerima Bantuan Iuran	96.701.058	96.733.944	96.753.724	96.725.576	32.886	(28.148)
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran					-	-
1	PPU Penyelenggara Negara	18.530.860	18.085.578	17.999.678	18.107.072	(445.282)	107.394
2	PPU Non Penyelenggara Negara	33.920.635	34.110.455	35.299.353	35.687.469	189.820	388.116
a.	BUMN	1.384.305	1.367.203	1.367.444	1.365.398	(17.102)	(2.046)
b.	BU Swasta	32.536.330	32.743.252	33.931.909	34.322.071	206.922	390.162
3	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU)	15.085.515	15.159.368	16.214.748	16.279.347	73.853	64.599
4	Bukan Pekerja (BP)	3.897.672	4.185.730	5.222.998	5.150.013	288.058	(72.985)
a.	BP Penyelenggara Negara (BP PN)	3.463.668	3.749.461	4.782.097	4.710.300	285.793	(71.797)
b.	BP Swasta (BP Non PN)	434.004	436.269	440.901	439.713	2.265	(1.188)
	Total B	71.434.682	71.541.131	74.736.777	75.223.901	106.449	487.124
C.	PBPUPU Pemda	36.233.942	36.597.305	42.051.687	42.552.132	363.363	500.445
	Total Peserta	204.369.682	204.872.380	213.542.188	214.501.609	502.698	959.421

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Berdasarkan tabel diatas, kinerja penambahan peserta aktif hingga Maret 2024 sebesar 214,5 juta jiwa, telah tumbuh 960 ribu jiwa dan lebih tinggi dibandingkan penambahan peserta aktif per Maret 2023. Peningkatan kinerja peserta aktif triwulan I 2024 ditopang dari segmen PBPU Pemda 500 ribu jiwa, PPU Penyelenggara Negara 107 ribu jiwa, PPU Badan Usaha 388 ribu jiwa, dan PBPU 64,6 ribu jiwa.

Kepesertaan non aktif per 31 Maret 2024 adalah sebesar 47,36 juta jiwa atau 18,8% dari total peserta. Peserta non aktif berkurang 6,4 juta jiwa dibanding 31 Desember 2023. Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 16,01 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPU Mandiri sebesar 15,65 juta. Disisi yang lain, peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 31,35 juta, yang terdiri dari dari segmen PBI, disebabkan verifikasi dan validasi data PBI, serta segmen PBPU Pemda, disebabkan inaktivasi peserta PBPU Pemda oleh Pemda. Selain itu, peserta non aktif mutasu dari PPU Non PN disebabkan oleh mayoritas akumulasi PHK/Pengunduran diri, dan peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, serta diikuti segmen yang lainnya.

Indikator Capaian Kinerja (ICK) Peserta Aktif Tahun 2024 dan Realisasi Per Juni 2024



Sumber : BPJS Kesehatan

Sebagaimana Grafik 1.2 diatas, secara keseluruhan target ICK 2024 telah tercapai sebesar 94,8% pada Juni 2024. Segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) telah mencapai target sebesar 96,7%, segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) telah mencapai target 92,9% dan segmen Bukan Pekerja (BP) telah mencapai target 93,4%.

Kesimpulan dan rekomendasi

Meskipun peserta yang telah terdaftar pada 31 Maret tahun 2024 mencapai 96% dari jumlah penduduk Indonesia, namun cakupan peserta aktif hanya berada diposisi 76,41% dari jumlah penduduk. Hal tersebut perlu menjadi perhatian utama Pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam merancang kebijakan dan program kerjanya. Kebijakan dan program kerja agar diarahkan dalam rangka meningkatkan peserta yang non aktif akibat menunggak maupun karena mutasi. Beberapa rekomendasi dalam rangka memperbaiki kondisi kepesertaan program JKN adalah sebagai berikut :

- **Penegakan Kepatuhan**

Semakin tingginya peserta non aktif program JKN perlu menjadi perhatian pemerintah maupun BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan sinergi penegakan kepatuhan peserta dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dalam ranah kebijakan, perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat (*ability to pay*) dalam membayar iuran, khususnya pada segmen PBP yang banyak memiliki penghasilan tidak menentu.

- **Opsi Kebijakan Kepesertaan PPU UKM**

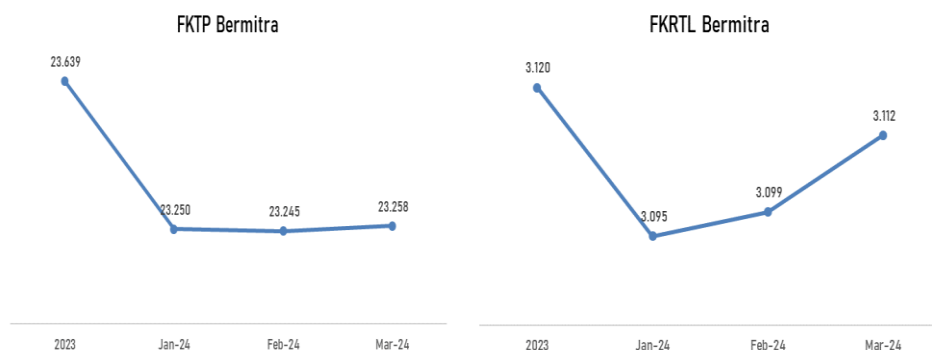
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, telah mendukung PPU UKM untuk dapat menjadi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), dimana batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta PPU dikecualikan bagi Peserta PPU pada usaha mikro dan kecil, yang kemudian perlu dilakukan kajian aktuaria oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Kesehatan.

- **Pemutakhiran Data PMI**

BPJS Kesehatan perlu melakukan pemutakhiran data peserta khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang ke Indonesia, dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. BPJS Kesehatan juga perlu mengadakan koordinasi reguler (pertemuan rutin dan target-target konkrit yang dievaluasi bersama) antara Pemerintah Daerah (yang membidangi Imigrasi, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan), BP3MI, dan BPJS Ketenagakerjaan.

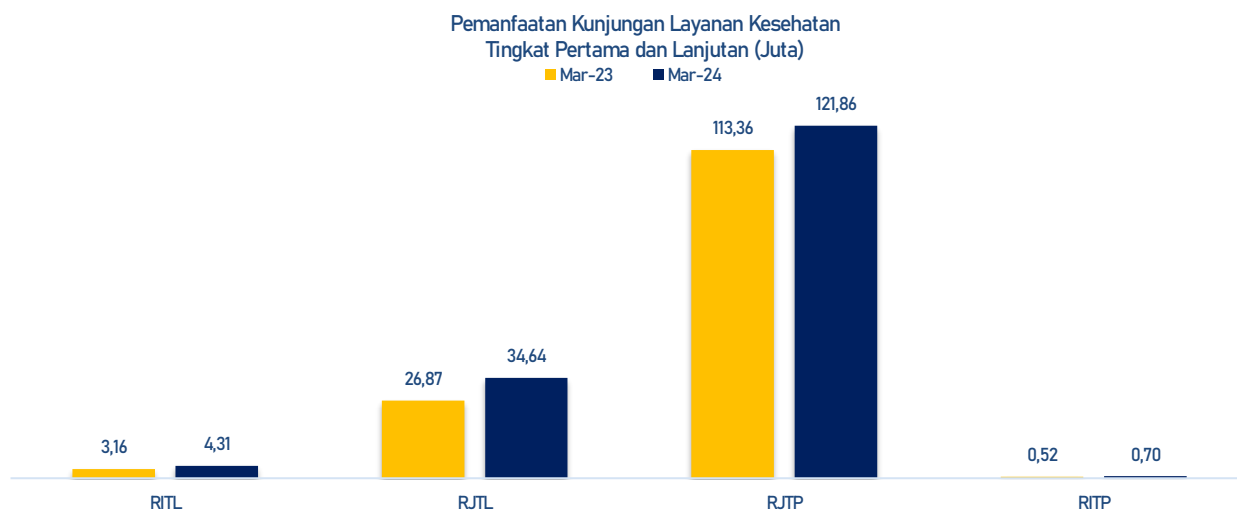


II. Kerjasama Faskes dan Utilisasi



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Kerjasama FKTP mengalami penurunan dibanding 31 Desember 2023. Kerjasama dengan FKTP sebanyak 23.245 atau turun sebesar -381 FKTP dibanding 31 Desember 2023, FKTP dokter perorangan adalah yang terbesar penurunannya, sebesar -213, diikuti Klinik Pratama sebesar -133, secara keseluruhan kerjasama dengan FKTP masih dibawah target ICK DJSN Tahun 2024 sebanyak 23.664 FKTP. Realisasi **kerjasama FKRTL** per Maret 2024 sebesar 3.112 atau turun -8 FKRTL dibanding realisasi 31 Desember 2023, dan tersedia Faskes Penunjang berupa 446 Klinik Utama, 4.309 Apotek dan 1.187 Optik.

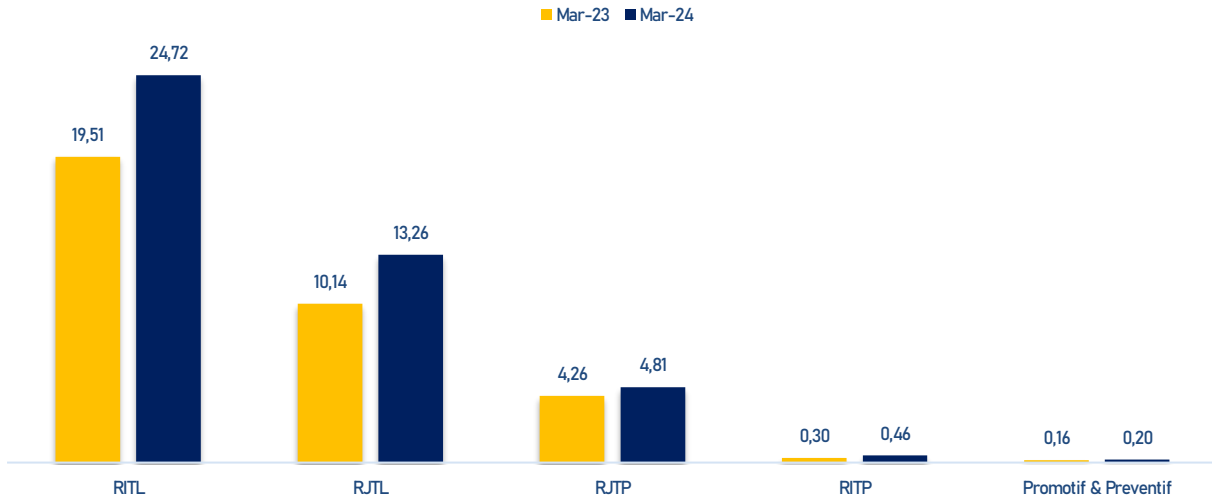


Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Jumlah kunjungan pada FKTP per 31 Maret 2024 sejumlah 121,86 juta kunjungan, mengalami peningkatan 8% atau 8,5 juta kunjungan dibanding Maret 2023. Begitu juga dengan rujukan yang mengalami peningkatan, dari 7,86 juta rujukan pada Maret tahun 2023, meningkat 1,58 juta rujukan menjadi 9,4 juta pada Maret 2024 atau meningkat sebesar 20%.

Pemanfaatan layanan kesehatan per 31 Maret 2024 meningkat sebanyak 15,84% sejak Maret 2023. Pada Maret 2024, pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada kunjungan sakit dan sehat sebesar 121,86 juta kunjungan, diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 34,64 juta kunjungan, kemudian Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 4,3 juta kunjungan, dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 703,7 ribu.

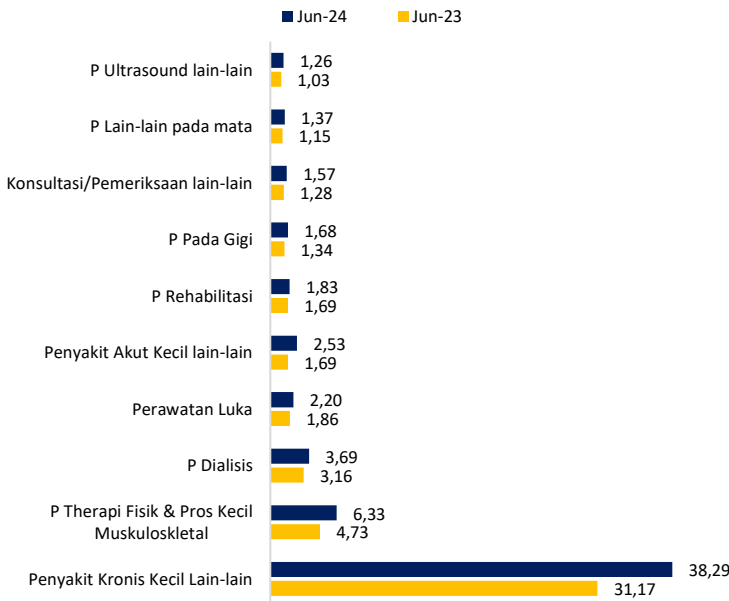
Realisasi Beban Jaminan Per Jenis Pelayanan (Triliun Rp)



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Jika dilihat **dari sisi beban jaminan**, alokasi beban jaminan didominasi pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp24,72 T atau 57% dari keseluruhan beban jaminan sebesar Rp 43,32 T, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebesar 31%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1% dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,5% dari keseluruhan beban jaminan.

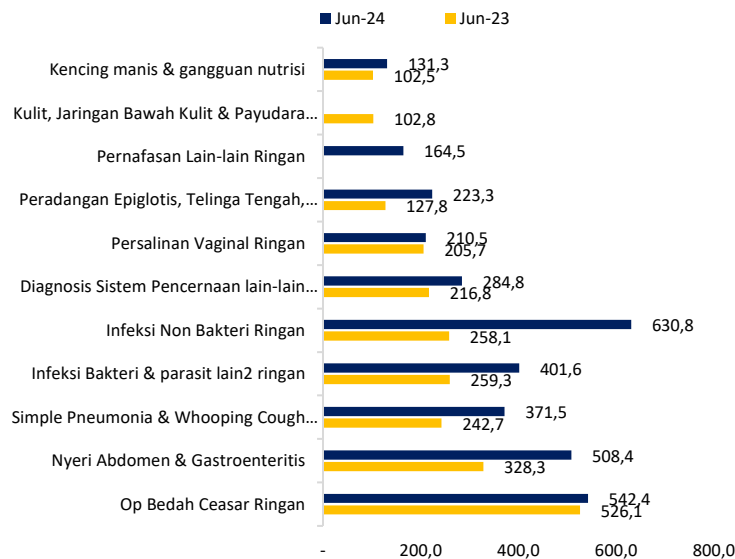
Sepuluh CBG's Terbanyak Pada Tingkat Layanan RJTL (satuan juta)



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Pembayaran manfaat RJTL sampai 31 Maret 2024 mencapai Rp 13,26 triliun. Dimana, jumlah kunjungan rawat jalan FKRTL adalah sebesar 34,64 juta kunjungan, dengan diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, sejumlah 18,95 juta kasus. Kemudian diikuti kunjungan prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal sejumlah 3,2 juta kasus, kunjungan untuk prosedur dialisis mencapai 1,7 juta kasus, diikuti dengan perawatan luka dan lain sebagainya.

**Sepuluh CBG's Terbanyak Pada Tingkat Layanan RITL
(dalam satuan ratusan ribu)**



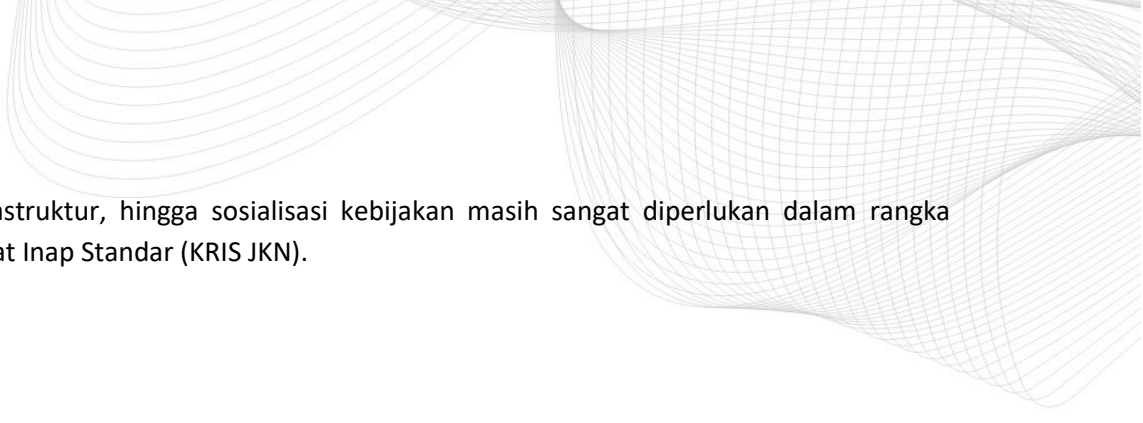
Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Pembayaran manfaat RITL sampai 31 Maret 2024 mencapai Rp 24,72 triliun, naik 31% dibanding pembayaran manfaat RITL pada Maret 2023. Dimana, jumlah layanan untuk kasus nyeri abdomen dan gastroenteritis lain-lain (ringan) sebanyak 259,3 ribu, diikuti kasus persalinan dengan kode INA CBG's operasi pembedahan caesar ringan mencapai 250,15 ribu kasus, simple Pneumonia & Whooping Cough (ringan) menduduki posisi ke 3 kasus tertinggi dengan 185,13 ribu. Kasus jaringan bawah kulit dan payudara ringan, menempati posisi ke 10 dan diikuti kasus kencing manis dan gangguan nutrisi diurutan ke 11 dan kasus lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gatekeeper* perlu diperkuat baik dari sisi sarana, prasarana, kompetensi dokter dan peraturan rujukan untuk mengurangi angka rujukan pasien ke rumah sakit dan mengurangi beban pelayanan dan beban biaya tambahan bagi peserta. Selain itu, BPJS Kesehatan perlu melakukan penguatan sistem pencegahan kecurangan/*fraud* melalui verifikasi klaim, verifikasi paska klaim serta audit administrasi klaim non kapitasi, dan pengendalian risiko biaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada setiap fase *prospective*, *concurrent*, dan *retrospective* pelayanan kesehatan

BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pemenuhan tenaga medis dokter spesialis/subspesialis dan sarana prasarana FKRTL sesuai kompetensinya. Selain itu, harmonisasi



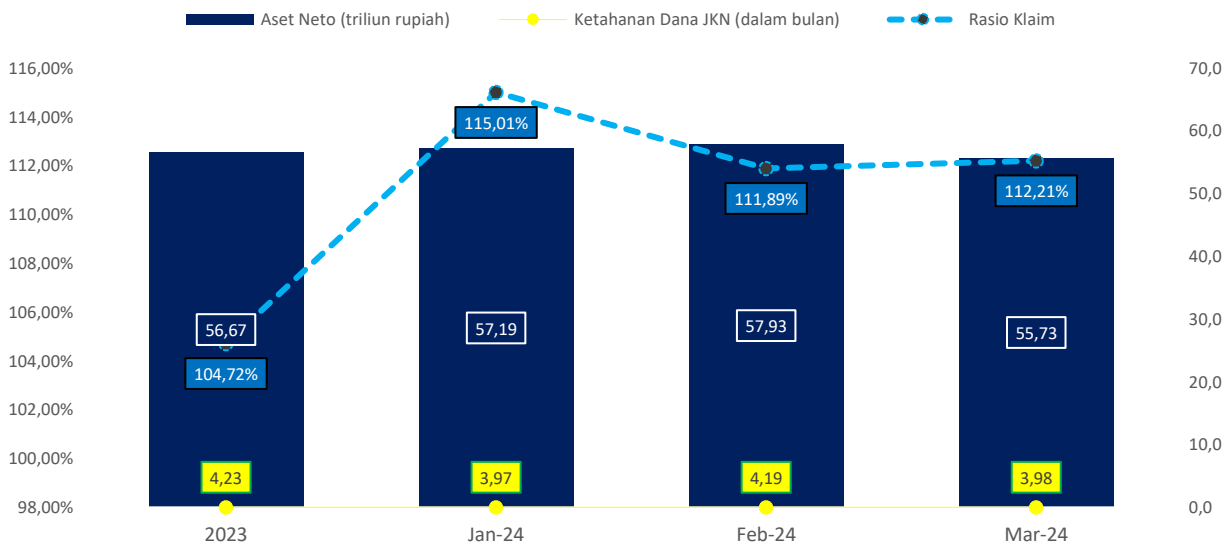
regulasi, perbaikan infrastruktur, hingga sosialisasi kebijakan masih sangat diperlukan dalam rangka implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS JKN).



II. Kesehatan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan

Pendapatan iuran JKN per 31 Maret 2024 tercapai sebesar Rp38,6 triliun atau 24% dari target tahun 2024 sebesar Rp160,42 triliun, realisasi **Beban Jaminan** sebesar Rp43,3 triliun, Aktivitas DJS Kesehatan telah mengalami defisit sebesar Rp2,177 triliun, defisit disebabkan oleh beban jaminan yang lebih besar dibanding pendapatan iuran, **rasio klaim telah mencapai 112%**. Rasio klaim naik signifikan dimulai sejak Januari 2023, diakibatkan oleh **1)** belum maksimalnya pendapatan iuran, **2)** telah diimplementasikannya Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN, dan **3)** Meningkatnya utilisasi layanan kesehatan.

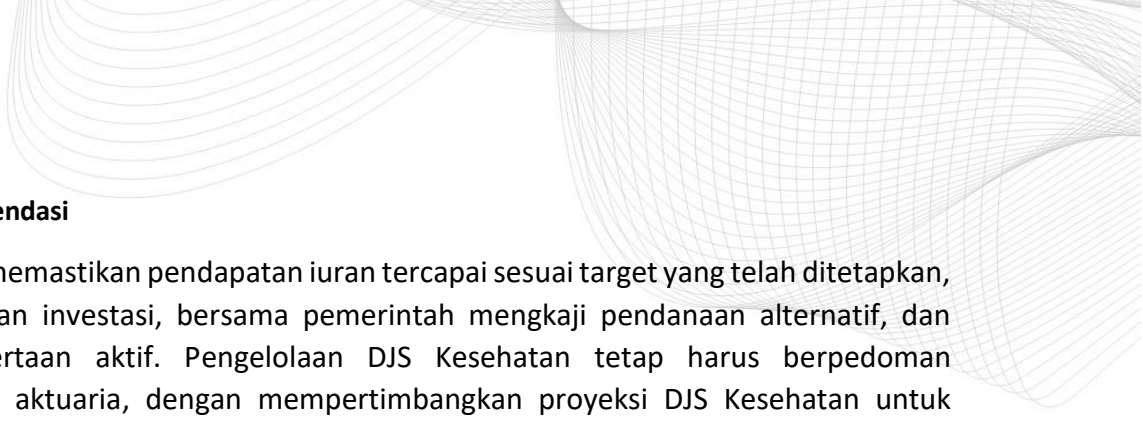
Aset Neto, Ketahanan Dana JKN, dan Rasio Klaim



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai **3,98 bulan kedepan** dan masih dalam koridor sehat sebagaimana PP 53 Tahun 2018 dan ICK DJSN Tahun 2024. Namun, dengan tren rasio klaim yang lebih dari 100% dari awal 2023, menggerus ketahanan DJS Kesehatan yang berpotensi menngulangi defisit dikemudian hari. **Yol DJS Kesehatan** tercapai sebesar 1,67% setara dengan imbal hasil investasi Rp1,388 triliun, dengan kelolaan Dana Investasi per 31 Maret 2024 sebesar Rp79,16 triliun, terbagi pada Deposito Rp44,29 triliun (56%), SUN Rp34,8 triliun (44%), target Yol sebagaimana ICK 2024 yang telah ditetapkan oleh DJSN sebesar 5,7%.

Dana operasional BPJS Kesehatan sebagaimana Permenkeu Nomor 148 Tahun 2023 paling besar adalah Rp5,7 triliun atau 3,66% dari iuran program. Realisasi **Beban terhadap Dana Operasional + pendapatan Investasi (BOPO)** per Juni 2024 telah berada diposisi **101,21%**, tingginya rasio BOPO mengindikasikan perlu adanya penyehatan melalui efisiensi anggaran dan optimalisasi investasi BPJS Kesehatan. **Yol BPJS Kesehatan** sebesar 1,50% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp156,78 miliar dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp10,74 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan sebagaimana ICK Tahun 2024 ditargetkan sebesar 7%.



Kesimpulan dan Rekomendasi

BPJS Kesehatan perlu memastikan pendapatan iuran tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, optimalisasi pendapatan investasi, bersama pemerintah mengkaji pendanaan alternatif, dan meningkatkan kepesertaan aktif. Pengelolaan DJS Kesehatan tetap harus berpedoman berdasarkan penilaian aktuaria, dengan mempertimbangkan proyeksi DJS Kesehatan untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Disisi yang lain, BPJS Kesehatan juga perlu memperbaiki efektivitas dan efisiensi beban operasional dan non operasional.

Tata kelola kendali mutu dan kendali biaya juga perlu diperkuat, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi rujukan berjenjang dan memastikan ketahanan DJS Kesehatan. Terdapat peningkatan kunjungan dan beban jaminan yang cukup signifikan khususnya pada RJTL dan RITL pada 2023 hingga semester I tahun 2024 perlu menjadi perhatian.

